

# KAJIAN POLITIK IDENTITAS DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA TARAKAN

Arri Bima Prastya  
NPP. 29.1969

Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: arribimaprastya@gmail.com

## ABSTRACT (in English)

**Problem/Background (GAP):** (Contains the background behind the research) As an archipelagic country with the highest number of tribes and religions in the world, Indonesia is a country of multiculturalism and multi-religion that currently affects the democratic process in Indonesia, one of which is the Regional Head Election. Tarakan City is an ethnic and religious compound city that in its democratic process is still affected by issues of religious and ethnic sentiments that are accommodated and used well by political elites as a weapon in every regional election. In this study. **Objectives:** The purpose of this study is to find out identity politics in the implementation of simultaneous regional elections in 2019 in Tarakan City, find out the supporting and inhibiting factors in its implementation and the government's efforts in overcoming identity politics problems in Tarakan City. **Methods:** In this study, researchers used qualitative methods with a case study approach, in finding and collecting researcher data using interviews, documentation, and Audio Visual methods. The theories used in this thesis are identity politics, multiculturalism, political participation, political elites, and simultaneous elections. **Results/Findings:** political elites and candidates for regional heads, as if deliberately maintaining or playing that identity politics, for the benefit of politics and the hegemony of power. This has an impact on political reality in the 2019 Simultaneous Regional Head Elections in Tarakan City and then. **Conclusion:** With a certain identity, candidates can do a bargaining position, this shows that ethnic and religious factors are significant enough to gain support and influence people's choices in the 2019 Simultaneous Regional Elections in Tarakan City. This also proves that the Tarakan people are voters who only care about figures and similarities in background rather than the abilities and abilities of the couple.

Keywords: Simultaneous Elections, Identity Politics, Political Elites

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Sebagai negara kepulauan dengan jumlah suku dan agama terbanyak di dunia, Indonesia merupakan negara multikulturalisme dan multi agama yang dewasa ini mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia yang salah satunya adalah Pemilihan Kepala Daerah. Kota Tarakan merupakan kota majemuk etnis dan agama yang dalam proses demokrasinya masih terpengaruh oleh isu sentimen agama dan etnis yang diakomodir dan dipergunakan dengan baik oleh para elit politik sebagai senjata dalam setiap pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik identitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2019 di Kota Tarakan, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya serta upaya pemerintah dalam mengatasi masalah politik identitas di Kota Tarakan. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dalam mencari dan mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan Audio Visual. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah politik identitas, multikulturalisme, partisipasi politik, elit politik, dan pilkada serentak **Hasil/Temuan:** elit politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu, untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Hal ini berdampak pada realitas politik di Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan lalu. **Kesimpulan:** Dengan identitas tertentu, calon kandidat bisa melakukan posisi tawar, ini menunjukkan faktor etnis dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat Tarakan merupakan pemilih yang hanya mementingkan figur dan kesamaan latar belakang dibandingkan kecakapan dan kemampuan pasangan.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Politik Identitas, Elit Politik

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Apabila membahas tentang demokrasi, erat kaitannya dengan budaya politik yang ada dan berkembang di tiap-tiap negara di dunia. Budaya politik biasanya berpusat pada pemikiran/*mindset* dari basis individu yang merupakan dasar semua tingkah laku masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan pemerintah dengan masyarakat yang dihubungkan melalui demokrasi yang dikaitkan lebih lanjut dalam budaya politik. Dapat dikatakan bahwasanya pemerintah merupakan instrumen yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan sebuah demokrasi. Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di tingkat daerah seperti fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya itu, pemerintah bekerja dan berkoordinasi di bawah satu komando yang dalam struktur organisasinya disebut sebagai kepala daerah. Kepala daerah bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas jalan dan lancarnya sistem pemerintahan di suatu daerah yang menjadi daerah kekuasaannya. Kota Tarakan merupakan salah satu daerah yang ada di sebuah provinsi termuda di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan satu-satunya wilayah administrasi kotamadya yang ada di provinsi ini. Kota Tarakan merupakan kota dengan keberagaman etnis dan agama yang membuatnya menjadi wilayah yang menjadi sasaran yang cukup empuk bagi para elit politik lokal untuk menyebarkan isu-isu politik identitas dan mengindikasikan adanya praktik politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tarakan, Isu politik identitas di Kota Tarakan sudah ada sejak awal pilkada di Kota Tarakan. Pilkada yang seharusnya diwarnai dengan suasana demokratis dimana setiap orang berhak untuk maju dan menang tanpa melihat pengaruh etnis akan tetapi dalam pemilihan tersebut hampir bisa dibilang tidak tampak.

### **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Sharma, et al (2010) yang difasilitasi IFES (International Foundation for Electoral Systems) dalam Sofianto (2015:163) mengenai pemilihan umum terhadap masyarakat Indonesia telah mengungkapkan pernyataan-pernyataan penting tentang dampak nilai dan norma terhadap demokrasi. Sebanyak (62%) masyarakat Indonesia mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh penting terhadap politik dan sebagian mempengaruhi pengambilan keputusan (44%) atau sebagian besar pengambilan keputusan (18%) dan sisanya mengatakan Agama tidak berpengaruh, Berdasarkan data di atas dapat

dilihat dan disimpulkan bahwa identitas menjadi salah satu tolok ukur yang berpengaruh dan berhasil mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Kota Tarakan sebagai kiblat perpolitikan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki berbagai macam agama yang dimiliki masyarakatnya, karena mengingat bahwa Kota Tarakan merupakan satu-satunya wilayah administrasi kotamadya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Pemeluk agama terbesar di Kota Tarakan yaitu agama Islam yang disusul dengan agama Kristen, Hindu, Budha, bahkan Khonghucu. Isu politik identitas di Kota Tarakan sudah ada sejak awal pilkada di Kota Tarakan. Pilkada yang seharusnya diwarnai dengan suasana demokratis dimana setiap orang berhak untuk maju dan menang tanpa melihat pengaruh etnis akan tetapi dalam pemilihan tersebut hampir bisa dibayangkan tidak tampak. Anggapan dan *mindset* bahwa hanya agama dan etnis yang lebih banyak pengikutnya yang akan mendapatkan suara terbanyak dan juga apabila diperhatikan bahwa isu pengaruh etnis lokal atau yang biasa disebut sebagai suku asli masih mendapat tempat di dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tarakan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Arif Sofianto (2015) penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai agama telah menjadi dasar dalam Pilkada Provinsi Jawa Tengah. Terlepas dari latar belakang dan ideologi partai, evaluasi kualitas tokoh politik. Penelitian kedua oleh Irfan Zharfandy (2013) penelitian ini menunjukkan bahwa masih berkembangnya politik identitas dalam Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2013 itu disebabkan karena adanya tiga faktor, yaitu: pertama, masyarakat hierarkis (patron-klien), kedua, polarisasi politik oleh elit lokal, ketiga, regulasi pemerintah. Penelitian Ketiga oleh Andy Prima Sahalatu (2018) menemukan bahwa elit politik dan calon kepala daerah jelas secara sadar mengasuh dan mempermainkan politik identitas untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Hal ini berdampak pada realitas politik Pilgub DKI Jakarta 2017.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan referensi dan perbandingan ketiga penelitian tersebut peneliti akan mencoba lebih mendetail pada bagaimana politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tarakan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana upaya Pemerintah dalam mengatasi politik identitas di Kota Tarakan.

### **1.5 Tujuan**

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik identitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2019 di Kota Tarakan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya serta upaya pemerintah dalam mengatasi masalah politik identitas di Kota Tarakan

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dalam mencari dan mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan Audio Visual. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah politik identitas, multikulturalisme, partisipasi politik, elit politik, dan pilkada serentak

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi atau komposisi penduduk Kota Tarakan yang terdiri dari multi etnis yang bisa dianggap mewakili suku-suku bangsa di Indonesia. Sehingga dengan demikian Kota Tarakan dapat dianggap sebagai miniatur Indonesia. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, jumlah penduduk di Kota Tarakan sampai dengan tahun 2020 berjumlah 244.651 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama di Indonesia.. Komposisi etnis di Kota Tarakan menurut data Sekretariat Daerah Kota Tarakan tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 3 suku besar yang mendominasi komposisi etnis di kota Tarakan yang dapat kita lihat di tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Komposisi Etnis Di Kota Tarakan**

Etnis	Jumlah (%)
Sulawesi (Bugis dan Toraja)	30%
Jawa	28%
Kalimantan (Dayak dan Tidung)	6%
Lainnya	36%
Total	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa suku yang berasal dari Sulawesi (Bugis dan Toraja) merupakan suku yang memiliki jumlah paling banyak di Kota Tarakan yaitu sebesar 30% dari jumlah masyarakat Kota Tarakan. Kemudian disusul dengan suku Jawa sebesar 28%. Sementara suku asli yaitu suku Kalimantan (Dayak dan Tidung) menduduki urutan ketiga dengan jumlah 6%. Untuk suku lainnya tersebar sebanyak 36% di seluruh penjuru Kota Tarakan. Dari sisi agama dan kepercayaan, tercatat ada 6 agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga terdapat di Kota Tarakan. Seperti yang dimuat di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2**

#### **Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kota Tarakan Tahun 2020**

No.	Agama	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Islam	209.259
2	Kristen	23.722

(1)	(2)	(3)
3	Katolik	8.387
4	Hindu	101
5	Budha	3.109
6	Konghuchu	69
7	Lainnya	4
	Total	244.651

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Tarakan merupakan Kota dengan multi agama dimana terdapat 6 agama besar di Indonesia yang terdapat di Kota Tarakan. Kota Tarakan sebagai satu-satunya daerah Kotamadya di Provinsi Kalimantan Utara tentu menjadi tolok ukur keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara di berbagai bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, tata pelayanan publik, maupun kegiatan sosial politik. Setiap pergantian pemimpin yang dalam hal ini adalah pergantian Walikota merupakan sesuatu yang menjadi perhatian tersendiri di berbagai kalangan di Kota Tarakan. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 ini, Kota Tarakan sudah memiliki 4 Walikota dan 5 Wakil Walikota dengan latar belakang yang beraneka ragam baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mantan anggota DPR serta dari kalangan anggota partai politik sehingga proses perebutan kekuasaan yang terjadi dalam pemilihan Walikota di Kota Tarakan berlangsung dengan sengit.

Krisis multi dimensi yang sangat kompleks dewasa ini, berdampak pada kondisi masyarakat Tarakan yang rentan terhadap munculnya gejolak-gejolak sosial di masyarakat yang disertai dengan kekerasan, sehingga masyarakat cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, kondisi sosial tersebut seringkali mengakibatkan tindak pelanggaran diluar koridor hukum yang ada, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Suhu politik di Tarakan semakin meningkat pada tahun 2019 lalu. Karena Kota Tarakan melaksanakan Pilkada serentak untuk yang pertama kalinya. Jika menggunakan pendekatan teori survei yang hanya mengambil sampel dari sejumlah populasi tertentu, maka sikap dan pilihan warga Tarakan dalam pemilihan Walikota Tarakan juga dapat menjadi sampel secara garis besar atas kecenderungan sikap pemilih pada pemilihan Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara. Dilihat dari berbagai segi dan jumlah suku yang ada di Indonesia, Tarakan memang terdiri dari banyak suku sehingga Tarakan bisa merepresentasikan pemilih Pemilu di Provinsi Kalimantan Utara sehingga isu Identitas menjadi salah satu senjata yang paling ampuh di pergunakan pasangan calon maupun tim sukses pasangan calon guna menarik simpati masyarakat Tarakan yang begitu beragam. Pilkada kali ini terasa berbeda dengan pilkada sebelumnya, selain karena dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia yang masa kepemimpinannya telah usai, pilkada kali ini memiliki jumlah pasangan calon terbanyak sehingga akan membuat pertarungan semakin menarik karena masyarakat dituntut untuk menentukan pasangan calon yang benar-benar sesuai untuk memimpin.

### **3.1 Politik Identitas Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu: a). Primordialisme yang dengan kata lain, identitas diturunkan dari generasi ke generasi, begitu pula dengan agama dan suku. Dalam pendekatan ini, aspek primordialisme digunakan sebagai sumber informasi utama untuk mendekati seseorang untuk menentukan apakah dia satu agama atau etnis. b). Konstruktivisme yaitu, identitas sebagai sesuatu yang terbentuk dan sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat dibentuk melalui kendala budaya dalam masyarakat karena pembentukan identitas nasional muncul dari proses sosial yang sedemikian kompleks yang melahirkan identitas kolektif dalam masyarakat, dalam prosesnya. Dalam masyarakat itu sendiri, seperti halnya dengan Bhineka Tunggal Ika, itu adalah identitas nasional bersama dalam upaya menyatukan kelompok di Indonesia, baik agama maupun etnis. c). Instrumentalisme yang menjelaskan bahwa Identitas merupakan sesuatu yang dibangun untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan pembentukan identitas, biasanya pembentukan identitas ini digunakan dalam pemilihan umum untuk memosisikan calon sebagai orang yang sama dengan masyarakat luas, seperti contohnya dalam pilkada Tarakan dimana masyarakat yang tergabung dalam kelompok elit berusaha meyakinkan golongannya untuk memilih satu nama yang memiliki kesamaan dengan mereka sehingga dapat mendongkrak suara dalam pilkada tersebut.

Politik identitas menjadi begitu efektif dalam pemilihan pemimpin daerah sehingga terjadi dalam bentuk interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan rakyat. Penguatan identitas individu segelintir calon dilakukan dengan penguatan pembangunan identitas diri di masyarakat. Politik identitas yang merujuk dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan) dijadikan sebagai alat untuk merebut simpati publik. Lebih lanjut, perkembangan politik identitas saat ini telah melihat pergeseran makna identitas yang sebenarnya, karena identitas tidak digunakan untuk mengidentifikasi atau mencirikan diri individu melainkan karena kepentingan kelas politik. Ini terlihat jelas dalam ajang pemilihan kepala daerah Kota Tarakan tahun 2019. Adapun pembentukan politik Identitas di Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan sebagai berikut:

- a. Media Sosial
- b. Pembentukan Paguyuban
- c. Tempat Ibadah

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Politik Identitas Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2019 Di Kota Tarakan**

Politik identitas bisa positif atau negatif. Bersifat positif berarti menyengol, mengakui dan menerima perbedaan, bahkan lebih mengakui predikat keistimewaan di suatu daerah daripada di daerah lain, karena alasan historis dan logis. Negatif jika terjadi diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, misalnya jika mayoritas diuntungkan atas minoritas. Dominasi dapat dihasilkan dari perjuangan kolektif dan menjadi lebih berbahaya jika dibenarkan oleh negara. Ada beberapa faktor pendukung terjadinya politik identitas seperti yang terjadi di pilkada Kota Tarakan diantaranya adalah :

### **3.2.1 Faktor Pemerintah Kota Tarakan**

Pemerintah Kota Tarakan merupakan pengawas politik yang berada di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Kesbangpol Kota Tarakan merupakan suatu Lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur tentang gerakan politik di Kota Tarakan. Namun dalam hal ini pemerintah seolah-olah memelihara politik identitas sehingga politik identitas semakin tumbuh dan berkembang di Kota Tarakan.

### **3.2.2 Isu Etnis**

Kota Tarakan merupakan sebuah kota majemuk etnis yang dimana di dalamnya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Indonesia. Etnis merupakan sesuatu yang sensitif bila dibicarakan lebih mendalam. Namun dalam kenyataannya bahwa isu etnis inilah yang menjadi senjata pamungkas yang digunakan oleh elit politik untuk mendapat suara dan dukungan dalam perebutan kekuasaan di Kota Tarakan.

### **3.2.3 Isu Agama**

Kota Tarakan selain memiliki kemajemukan etnis juga memiliki kemajemukan agama dimana ada beragam agama yang terdapat di Kota Tarakan. Agama-agama tersebut hidup berdampingan saling bertoleransi satu sama lain. Namun dalam konteks politik, hanya ada satu agama dominan dimana dari Walikota pertama Kota Tarakan hanya agama itu saja yang berhasil memimpin Kota Tarakan. Agama tersebut adalah agama Islam yang memiliki 209.259 jiwa pengikut di Kota Tarakan. Dengan jumlah yang sebesar itu agama Islam menjadi salah satu syarat yang tersirat dan turun temurun agar pasangan calon bisa mengajukan diri menjadi calon Walikota di Kota Tarakan.

### **3.2.4 Pengaruh Elit Politik**

Peran elit politik memang tidak pernah terlepas dari lahirnya praktik politik identitas di daerah manapun tidak terkecuali di Kota Tarakan. Elit politik di Kota Tarakan bergabung berdasarkan identitas mereka. Kebanyakan dari mereka berkumpul dan membentuk paguyuban berdasarkan etnis mereka sendiri. Paguyuban yang awal tujuannya adalah untuk menaungi etnis tertentu malah pada kenyataannya dijadikan alat politik yang mampu menjanjikan suara besar bagi pasangan calon yang memiliki kesamaan dengan orang-orang yang berada di paguyuban tersebut.

### **3.3 Upaya Pemerintah Kota Tarakan Dalam Mengatasi Politik Identitas Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan**

upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Tarakan sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Tarakan yaitu melaksanakan sosialisasi Pendidikan politik yang dalam hal ini sasarannya adalah para pemilih pemula. Upaya lainnya adalah upaya pengawasan bersama pihak Bawaslu sebagai Badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan di Kota Tarakan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian pertama oleh Arif Sofianto (2015) menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai agama telah menjadi dasar dalam Pilkada Provinsi Jawa Tengah begitu juga yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah di Kota Tarakan pada tahun 2019 dimana politik identitas tetap terjadi dengan mengedepankan kesamaan suku atau agama. Penelitian kedua oleh Irfan Zharfandy (2016) ini menunjukkan bahwa masih berkembangnya politik identitas dalam Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2013 itu disebabkan karena adanya tiga faktor, yaitu: pertama, masyarakat hierarkis (patron-klien), kedua, polarisasi politik oleh elit lokal, ketiga, regulasi

pemerintah. Hal yang sama masih menjadi dominasi pada saat pemilihan kepala daerah di Kota Tarakan dengan persamaan unsur masyarakat hierarkis, poliarisasi dan regulasi pemerintah. Penelitian ketiga oleh Andy Prima Sahalutua (2018) menemukan bahwa elit politik dan calon kepala daerah jelas secara sadar mengasuh dan mempermainkan politik identitas untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Tidak ditemukan permainan politik dari elit global akan tetapi adanya dominan politik identitas pada saat pemilihan kepala daerah di Tarakan pada tahun 2019.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pembentukan politik identitas di Kota Tarakan terjadi melalui pendekatan instrumentalisme dimana keuntungan yang dimiliki oleh calon dikreasikan sedemikian rupa sebagai bentuk kelebihan untuk mendulang suara sebanyak banyaknya yang dalam hal ini berupa kesamaan latar belakang dengan masyarakat. Politik identitas di Kota Tarakan terjadi melalui media sosial, pembentukan paguyuban, dan tempat ibadah. faktor pendukung terjadinya politik identitas di Kota Tarakan yaitu: faktor Pemerintah Kota Tarakan yang secara tidak langsung seolah memelihara terjadinya praktik politik identitas di Kota Tarakan, faktor isu etnis, faktor isu agama, serta pengaruh elit politik yang memberikan pengaruhnya terhadap golongannya untuk memilih pasangan calon yang mereka dukung melalui paguyuban yang mereka bentuk. upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi dan mengontrol jalannya politik di Kota Tarakan yaitu sosialisasi Pendidikan politik kepada pemilih pemula dan berkoordinasi dengan Bawaslu.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** penulis memfokuskan hasil dari penelitian ini untuk menjelaskan lebih tentang masih adanya politik identitas yang terjadi di Kota Tarakan pada saat pemilihan kepala daerah Khususnya tahun 2019. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu pemerintah serta masyarakat dalam menjalankan serta memilih kepala daerahnya dengan kemampuan memimpin yang baik bukan dari kesamaan ras, suku, ataupun agama.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, U. (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesia Tera.
- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol.28 no.(2), 111–116. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5451/2120>
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- Djalal, F dan Supriadi, D. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita.

Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan : Suatu Bahasan Pengantar*.

Moleong, J. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roesdakarya Offset.

Nain, U. (2007). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Widayanti, T. (2009). *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM. Yogyakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

